



**KEPALA DESA CICINDE SELATAN
KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG**

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA CICINDE SELATAN
(RPJMDes)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CICINDE SELATAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka RPJMDes perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan -kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. bahwa menetapkan RPJMDes sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
- c. bahwa untuk menjabarkan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- e. bahwa diperlukan adanya perubahan tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2011 - 2015.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa /Kelurahan;
4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA CICINDE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CICINDE SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2016 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

- (1).Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Cicinde Selatan, dan Badan *Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cicinde Selatan*;
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3). Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah Kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program Prioritas Kewilayahan , disertai dengan Rencana Kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan , kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes

Pasal 2

- (1). Rencana RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- (2). Dalam menyusun Rancangan RPJMDes, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang di wakili oleh LPM;
- (3). Rancangan RPJMDes yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima Rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang *Perencanaan Pembangunan desa*;
- (5). Jika Rancangan RPJMdes berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDes;
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa melaksanakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (7).Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RJPMDes

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai Demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam Forum Musrenbang Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJMDes ini akan di atur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJMDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : di Cicide Selatan

Pada Tanggal : 02 Pebruari2016

KEPALA DESA CICINDE SELATAN,



Diundangkan di : Desa Cicide Selatan

Pada Tanggal : 02 Pebruari 2016

Sekretaris Desa,

ELA KOMALA



**PERATURAN DESA CICINDE SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RJPJMDes)
TAHUN 2016-2021**

**DESA CICINDE SELATAN
KECAMATAN BANYUSARI
KABUPATEN KARAWANG**

DAFTAR ISI

NO	JUDUL FORMULIR	PASAL TERKAIT	NAMA FORM	HALAMAN
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	Pasal 11	F.1.1	
2	Data Desa	Pasal 13		
	2.1 Daftar Sumber Daya alam		F.1.2.1	
	2.2 Daftar Sumber Daya Manusia		F.1.2.2	
	2.3 Daftar Sumber Daya Pembangunan		F.1.2.3	
	2.4 Daftar Sumber Budaya Sosial Budaya		F.1.2.4	
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Pasal 16	F. 13	
	3.1 Daftar Gagasan Dusun /Kelompok		F.1.3.1	
	3.1a Contoh Sketsa Desa		F.1.3.1a	
	3.1b Contoh Kalender Musim		F.1.3.1b	
	3.1c Contoh Bagan Kelembagaan		F.1.3.1c	
4	Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa	Pasal 17	F.1.4	
	4.1 Laporan Hasil Pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)	Pasal 18	F.1.4.1	
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	Pasal 21	F.1.5	
6	Rancangan RPJM Desa	Pasal 22	F.1.6	
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	Pasal 23	F.1.7	
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F.1.8	
9	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	Pasal 32	F.1.9	
10	Pagu Indikatif Desa	Pasal 36	F.1.10	
11	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	Pasal 36	F.1.11	
12	Rancangan RKP Desa	Pasal 41	F.1.12	
	Lampiran rancangan RKP	Pasal 41		
	12.1 Proposal teknis		F.1.12.1	
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana		F.1.12.1.1	
	12.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pasal 42	F.1.12.2	
	12.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB	Pasal 42	F.1.12.3	
13	Daftar Usulan RKP Desa	Pasal 43	F.1.13	
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa	Pasal 44	F.1.14	
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 48	F.1.15	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam upaya standarisasi Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

RPJM-Desa ini merupakan penjabaran Visi, Misi kedalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan Desa dalam jangka 5 (lima) tahun, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.

Disusunnya RPJM-Des ini selain sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Des Tahunan dan APB-Des juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama masa jabatannya.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJM-Desa Tahun 2016-2021, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 06 Tahun 2006 Pasal 134 tentang Peraturan Desa dan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 06 Tahun 2006 Pasal 141 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 06 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor : 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa,

1.3. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program - program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RPJM-Des Desa Cicinde Selatan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan desa, kecamatan maupun SKPD Tingkat Kabupaten, Provinsi dan seterusnya. Karena RPJM-Des ini merupakan hasil proses perencanaan dari bawah (*Bottom up planning*) sebagai suatu sistem perencanaan berjenjang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan Tingkat Pusat. Perencanaan pada masing-masing tingkat merupakan Sub Sistem Perencanaan Nasional yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penyusunan RPJM-Des telah memperhatikan RPJM-Daerah Kabupaten Karawang, RPJM-Daerah Propinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional, sehingga diharapkan akan terwujud sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RPJM-Des untuk setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKP-Des dan dijadikan pedoman bagi penyusunan RAPB-Des.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJM-Des adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai :

1. Penjabaran Visi, Misi Desa ;
2. Pedoman dalam penyusunan RKP-Des ;
3. Pedoman dalam Penyusunan APB-Des ;
4. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
5. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada semua tingkat pemerintahan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM-Des ini adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa ;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa ;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) disusun berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

1. **Pemberdayaan**, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan ke mandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. **Partisipatif**, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan ;
3. **Berpihak kepada masyarakat**, yaitu seluruh proses pembangunan di perdesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin ;
4. **Terbuka**, yaitu setiap proses terhadap perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa ;
5. **Akuntabel**, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintah di desa maupun pada masyarakat ;
6. **Selektif**, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal ;
7. **Efisiensi dan efektif**, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia ;
8. **Keberlanjutan**, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan ;
9. **Cermat**, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat ;
10. **Proses Berulang**, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik ; dan
11. **Penggalian Informasi**, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.6. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM-Des :

1. Penyusunan Rencana

- Pengkajian Keadan Desa
- Musdes Penyusunan Draft
- Musrenbang-Des

2. Penetapan Rencana

- Musyawarah BPD
- Penetapan PERDES

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Cicinde Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum, pengertian, maksud dan tujuan, proses penyusunan, tahapan penyusunan dan sistematika penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi Pemerintahan Desa, pembagian wilayah Desa dan struktur Pemerintahan Desa.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

Bagian ini berisikan potensi yang dimiliki oleh Desa serta permasalahan yang ada pada situasi dan kondisi saat ini.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)

Memuat Visi dan Misi Desa, arah dan kebijakan pembangunan Desa, potensi dan masalah, program pembangunan Desa dan strategi pencapaian.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.1.1. Legenda Desa (Sasakala)

Sejarah singkat Desa Cicinde Selatan

Kilas balik pada sejarah sebelum masa penjajahan Belanda, nama **Cicinde** asalnya **Cinde Wulung** yang diadopsi dari nama benda sakti yang berasal dari putri Raja Manggala yang bernama Nyi Mas Dewi Langen Sari. Cinde Wulung adalah nama tusuk konde dan karembong (selendang) yang berwarna hitam kemerahan. Kemudian seiring berjalannya waktu masyarakat hanya menyebut kata awalnya saja yaitu Cinde, yang akhirnya diberi tambahan suku kata sesuai dengan lapalan orang-orang terdahulu juga sebagai tempat persinggahan terakhir sang putri di dekat muara sungai yaitu menjadi **CICINDE**, yang mempunyai arti **CI** adalah **Cai (air)** dan **Cinde** adalah benda sakti dan sebagian masyarakat ada yang mengartikan Air yang Sakti, sehingga pengaruhnya pada saat ini air sebelah timur Cicinde tidak akan mengalami kekurangan dan kekeringan termasuk air pesawahan.

Sang putri Langen Sari awalnya singgah disekitar muara sungai, karena tempat itu sangat strategis, keindahan alamnya sangat cocok sebagai lalu lintas perairan dan pada akhirnya Nyi Mas Dewi Langen Sari menetap ditempat tersebut dan tempat itu merupakan suatu perkampungan yang disebut **CICINDE**.

Tahun 1875 dimulainya system pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama **ASMAR**, sekaligus kepala desa pertama yang mengukir sejarah berdirinya Desa Cicinde. Pada tahun 1984 Desa Cicinde dipecah menjadi Desa Cicinde Utara dan Desa Cicinde Selatan

2.1.1.2. Kepemimpinan Desa

Pejabat Kepala Desa yang pertama sampai dengan sekarang secara berturut-turut sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Urutan Pejabat Kepala Desa
sampai dengan Tahun 2016

NO	NAMA	TAHUN	KETERANGAN
1	H. ERGAT SOPANDI	1984-1992	
2	H. ERGAT SOPANDI	1992-2000	
3	IRWAN SILAIS, Bc.p.Sos	2000-2006	
4	SAEPUL ROHMAN	2006-2012	
5	DASUM	2012-2018	

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Letak Geografis

Desa Cicinde Selatan merupakan salah satu dari 12 Desa di Wilayah Kecamatan Banyusari yang terletak di sebelah timur Pusat Pemerintahan Kecamatan Banyusari, dengan batas-batas sebagai berikut :

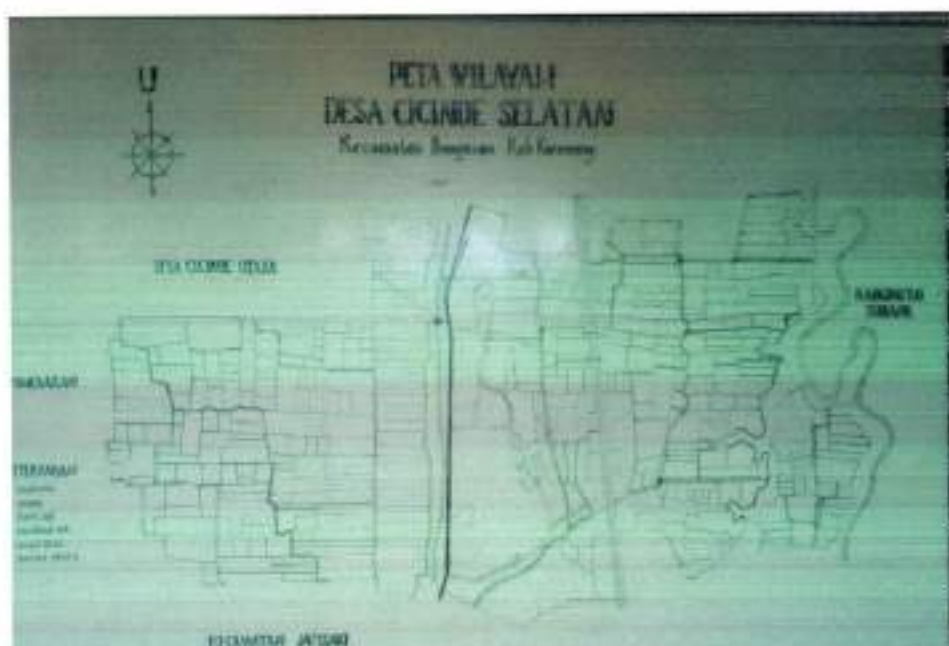
- Utara : Desa Cicinde Utara
- Timur : Desa Tambak Jati Kabupaten Subang
- Selatan : Desa Desa Jatiwangi dan Desa Jatibaru Kec. Jatisari
- Barat : Desa Pamekaran

Cicinde Selatan mempunyai luas wilayah seluas ± 305,596 Hektar.

Desa Cicinde Selatan berada di sebelah Barat Daya Ibu kota Kecamatan Banyusari, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Karawang 24,5 Km, jarak ke Ibu Kota Provinsi Bandung 128,6 Km dan jarak ke Ibu Kota Negara Jakarta 89,3 Km.

Tabel 2

Peta Administratif Desa Cicinde Selatan



2.1.2.2. Topografi

Desa Cicinde Selatan merupakan Desa yang berada di daerah dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian 1,5 M diatas permukaan air laut. Sebagian besar wilayah Desa adalah lahan pertanian/sawah.

2.1.2.3. Hidrologi dan Klimatologi

Sumber air yang ada di Desa Cicinde Selatan meliputi air permukaan.

Sesuai dengan kebijakan penyediaan air baku untuk irigasi, maka di Desa Cicinde Selatan mendapat pasokan pelayanan irigasi berasal dari Bendungan Air Juanda Jatiluhur yang berada di daerah Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, masyarakat sebagian besar menggunakan air bersih dari Sumur Pompa Mesin Jetfump dan sebagian kecil dari Perusahaan Air Minum (PAM) dan sebagian yang lain dari sumur-sumur pompa tangan.

2.1.2.4. Luas dan Sasaran Penggunaan Tanah

Luas Desa seluruhnya \pm 305,596 Ha, terdiri dari lahan sawah 250 Ha (81,8 %) dan tanah darat 55,596 Ha (18,2 %). Untuk lebih jelasnya mengenai luas dan penggunaan tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tablei 3

Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya

NO	LAHAN		LUAS (Ha)
1	Lahan Sawah	a.Sawah Teknis	250
		b.Sawah setengah teknis	-
2	Lahan Darat	a.Pemukiman	18,5
		b.Pekarangan	5
		c.Tegalan	21,096
		d.Lain-lain	11
	JUMLAH		305,596

2.1.3 Keadaan Sosial**2.1.3.1 Kependudukan**

Penduduk Desa Cicinde Selatan berdasarkan data terakhir hasil Pendataan Penduduk Tahun 2015 tercatat sebanyak 5.981 jiwa, selama tiga tahun terakhir ini jumlah penduduk mengalami kenaikan rata-rata pertahun 1 %.

Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tablei 4Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Tahun 2015 – 2016

No	Tahun	Jumlah		Laju Pertumbuhan (%)
		Jiwa	KK	
1	2015	5.981	1.820	1 %
2	2016	5.985	1.823	1 %
3	-	-	-	-

Proyeksi jumlah penduduk untuk 3 (tiga) Tahun kedepan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

- Tahun 2017 : 6.044 Jiwa
- Tahun 2018 : 6.103 Jiwa
- Tahun 2019 : 6.162 Jiwa

Tabel 5

Data Penyebaran Penduduk

No	Dusun/RW	Jumlah		Kepadatan Per Km ²
		Jiwa	KK	
1	Cicinde I A	2.030	611	33,9
2	Cicinde I B	1.674	528	27,9
3	Bangsasuta	2.277	681	38,1
Jumlah		5.981	1.820	99,9

2.1.3.2. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pelaksanaan pembangunan pada saat ini menurut UNDP diukur dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indek ini akan mengukur sampai sejauhmana efektifitas pelaksanaan pembangunan. Indek tersebut merupakan rata-rata capaian IPM Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai dengan Provinsi yang meliputi Indek Pendidikan, Indek Kesehatan dan Indek Daya Beli.

Perkembangan capaian IPM Desa Cicinde Selatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Indek Pendidikan	-----	-----	-----
2	Indek Kesehatan	-----	-----	-----
3	Indek Daya Beli	-----	-----	-----
Target IPM Desa Cicinde Selatan		-----	-----	-----
Target IPM Kec. Banyusari		-----	-----	-----
Target IPM Kab. Karawang		-----	-----	-----

2.1.3.3. Kesehatan

Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat secara berkesinambungan.

Prasarana dan sarana kesehatan di Desa Cicinde Selatan masih relatif kurang, baik kuantitas maupun kualitasnya bila dibanding dengan

ratio jumlah penduduk , yaitu kiranya masih belum memadai untuk dapat melayani kesehatan masyarakat dengan baik.

Untuk lebih jelasnya Tenaga dan Fasilitas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7
Data Prasarana dan Sarana Kesehatan

No	Prasarana dan Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
Prasarana Kesehatan :			
1	Puskesmas	-	-
2	Puskesmas Pembantu	-	-
3	Balai Pengobatan Alternatif	-	-
4	Praktek Dokter	1	Klinik
5	Rumah Bersalin	-	-
6	Apotik	-	-
7	Toko Obat	-	-
8	Polindes	-	-
9	Posyandu	8	Tersebar
Sarana Kesehatan :			
1	Dokter	1	Dokter Umum
2	Perawat		
3	Bidan	3	
4	Dukun Bersalin/Paraji	-	-
5	Kader Posyandu	24	

Jumlah kelahiran bayi (persalinan) pada tahun 2015 sebanyak 18 jiwa, terdiri dari bayi lahir hidup sebanyak 18 jiwa dan tidak bayi lahir mati. Untuk lebih jelasnya kelahiran bayi hidup dan lahir mati selama 3 (tiga) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kelahiran Mati
Tahun 2015 - 2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Bayi Lahir Hidup		18	2
2	Bayi Lahir Mati	-	-	-
Jumlah			18	2

2.1.3.4. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dasar pembangunan dimasa yang akan datang. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan cukup tinggi, terbukti anak-anak usia sekolah hampir seluruhnya mengikuti jenjang pendidikan yang telah tersedia.

Data jumlah murid dan Guru/Ustad sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 9

Jumlah Siswa dan Guru

No	Uraian	PAUD	TK/ TPA	SD	MI	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK
1	Murid	26	30	290	120	35	15	-
2	Guru	3	4	5	3	6	-	-

Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada masih perlu peningkatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna tercapainya mutu pendidikan anak didik yang lebih baik lagi.

Data Sarana dan Prasarana Pendidikan baik negeri maupun swasta, dan formal maupun non formal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10

Data Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Nama Sekolah	Lokasi (RT/RW)	Jumlah	Status (Neg/Swt)
1	TPA/PAUD	Dusun Cicinde IA, Cicinde IB dan Bangsasuta	3	Swt
2	SD	Dusun Cicinde I A	1	Neg
3	MI/MDT	Dusun Cicinde IA dan Bangsasuta	3	Swt
4	SMP	-	-	-
5	MTs	-	-	-
6	SMA	-	-	-
7	MA	-	-	-
8	SMK	-	-	-
9	PKBM	-	-	-

2.1.3.5. Kesejahteraan Sosial

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembangnya dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial.

Keadaan ini bisa dilihat pada data tabel tentang penyandang masalah sosial (PMKS) dibawah ini

Tabel 11

Data Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Ket.
1	Anak Terlantar	-	-
2	Anak Nakal	-	-
3	Anak Jalanan	-	-
4	Lansia Terlantar	-	-
5	Pengemis	-	-
6	Gelandangan	-	-
7	Pekerja Sek Komersial	-	-
8	Eks Narapidana	-	-
9	Penyandang cacat	2	-
10	Keluarga Miskin Sosial	473	-
11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-
12	Keluarga Rumahnya Tidak Layak Huni	17	-
13	Korban NAPZA	-	-
14	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-
15	Pemulung	2	-
16	Janda PKRI	-	-
17	Lainya	-	-

2.1.3.6. Ketenagakerjaan

Menurut data hasil Suseda 2010, tingkat partisipasi angkatan kerja di Desa Cicinde Selatan mencapai 40 %, jika dilihat berdasarkan perspektif jender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 25 % terdapat ketimpangan yang sangat tajam dalam pasar kerja, dimana perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja dan laki-laki lebih diprioritaskan.

Mengenai dampak ketenagakerjaan terhadap pendapatan rumah tangga dampaknya sangat luas terhadap kemiskinan, karena kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga.

Mengingat sangat sempitnya lapangan pekerjaan para pencari kerja lebih memilih mencari pekerjaan diluar daerah, seperti di Jakarta dan dikota atau daerah lain baik didalam maupun diluar pulau Jawa bahkan diluar negeri sebagai TKI dan TKW.

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan ketenaga kerjaan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pencari kerja selalu bertambah, sedangkan penyerapan tenaga kerja sangat terbatas.
2. Pencari kerja/penganggur pada umumnya ;
 - a. Berpendidikan rendah
 - b. Keterampilan rendah

2.1.3.7. Pemuda dan Olah Raga

Dalam hal kepemudaan tidak terlepas dari aktifitas dan eksistensi Karang Taruna, Remaja Masjid dan organisasi kepemudaan lainnya.

Melalui berbagai kegiatan kepemudaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dapat terkendali hal-hal yang mengarah kepada kenakalan remaja, seperti tawuran, miras dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Sedangkan kegiatan keolahragaan yang ada di desa Cicine Selatan cukup variatif, seperti Sepak Bola, Bola Volly, Bulu Tangkis, dan Tenis Meja, namun semua kegiatan olah raga dimaksud masih dikelola secara amatir dan hanya penyaluran kegemaran saja.

Untuk lebih jelasnya data organisasi kepemudaan dan perkumpulan olah raga yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 12

Data Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

No	Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah	Ket.
1	Organisasi Kepemudaan	1. Karang Taruna	1
		2. Remaja Masjid	3
2.	Perkumpulan Olah Raga	1. Sepak Bola	1
		2. Bola Volly	3
		3. Bulu Tangkis	2
		4. Tenis Meja	2

2.1.3.8. Kebudayaan

Budaya dan Seni yang berkembang di Desa Cicinde Selatan tidak terlepas dari budaya yang berkembang di Kabupaten Karawang. Selain budaya lokal pengaruh budaya Arab, Eropa dan Hindu juga sangat kental sekali pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai jenis dan bentuk ekspresi budaya diwujudkan dalam berbagai cara, diantaranya ucapan Nadran, Ngunjung, Mapag Sri, Sedekah Bumi, dan sebagainya.

Sedangkan yang tergolong seni diantaranya Genjring, Rebana Qosidah, Marawis dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya data Kebudayaan yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 13
Data Kebudayaan / Upacara Adat

No	Nama Upacara Adat	Keterangan
1	Mapag Sri	Sewaktu-waktu
2	Sedekah Bumi	Sewaktu-waktu
3	Unjungan/Ngunjungan	Sewaktu-waktu

Tabel 14
Data Kelompok Kesenian

No	Nama Kelompok	Jumlah	Aktif/Tidak
1	Qosidah/Balasuk	1	Aktif
2	Genjring	-	-
3	Marawis	2	Aktif

2.1.3.9. Tempat Peribadatan

Masyarakat Desa Cicinde Selatan sebagian besar memeluk Agama Islam, sehingga tempat peribadatan yang ada hanya Masjid, Mushola. Untuk lebih jelasnya data tempat peribadatan yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 15
Data Tempat Peribadatan

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	3	Tersebar
2	Mushola	11	Tersebar
3	Majlis Taklim	14	Tersebar

2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.1.4.1. Pajak dan Retribusi Desa

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Cicine Selatan Tahun 2015 mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2015 sebesar Rp. 46.022.005,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 16
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2015

No	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pajak PBB	40.742.127	41.332.911	41.569.330
2	Retribusi Desa	-	-	-
3	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	40.742.127	41.332.911	41.569.330

2.1.4.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Dana Desa dan Bantuan dari Gubernur Propinsi Jawa Barat adalah semua bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten kepada Pemerintah Desa guna menunjang biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kelembagaan Desa dengan mengembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.

Besaran bantuan ADD untuk Desa Cicine Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini secara berturut-turut mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 17

Data Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2013	146.300.000	ADD
2	2014	151.239.000	ADD
3	2015	509.400.000	ADD

2.1.4.3. Sumber Penerimaan Desa Lainnya

Sumber penerimaan desa lainnya dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18
Data Sumber Penerimaan Desa Lainnya

No	Sumber Penerimaan Desa	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	146.300.000	151.239.000	509.400.000
2	Bantuan Propinsi	115.000.000	115.000.000	115.000.000
3	Bantuan Dana Desa	-	-	291.396.633
4	PNPM-MP.	268.663.000	74.516.000	100.141.000
5	Retribusi Desa	-	-	-
6	Swadaya Masyarakat	19.300.000	-	25.000.000
7	Bantuan Pihak Ketiga	-	-	-
8	Bantuan BUMN	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		549.263.000	340.755.000	1.040.937.633

2.1.4.4. Prasarana dan Sarana Ekonomi

Prasarana dan sarana ekonomi menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Selain bergerak di bidang pertanian masyarakat Desa Cicinde Selatan banyak juga yang bergerak dibidang usaha, seperti industri rumah tangga, perdagangan, pertukangan dan jasa lainnya.

Data Prasarana dan Sarana Ekonomi sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19
Data Prasarana dan Sarana Ekonomi
Tahun 2015

No	Jenis Usaha	Jumlah	Ket.
1	Industri /Perusahaan	Heller	3
		Bengkel	4
2	Perdagangan	1. Toko	7
		2. Warung	35
		3. Kios Saprotan	1
3	Bank	-	-
		-	-
4	Koperasi	KUD	-
		BUMDES	1

2.1.4.5. Transportasi dan Perhubungan

Prasarana jalan di Desa Cicinde Selatan, terdiri dari Jalan Poros antar Desa, jalan lingkungan, jalan setapak dan jalan usaha tani. Kondisi jalan pada umumnya cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas fisik, namun ada sebagian jalan lingkungan dan jalan setapak serta jalan usaha tani yang masih perlu peningkatan dan perbaikan. Data keadaan prasarana jalan/perhubungan pada saat ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20
Keadaan Prasarana Jalan/Perhubungan
Tahun 2015

No	Jenis Jalan	Panjang (Km)	Keadaan Baik/Rusak	Ket.
1	Jalan Negara	-	-	-
2	Jalan Provinsi	-	-	
3	Jalan Kabupaten	2	Baik	2.000 M
4	Jalan Desa	3	Baik	3.000 M
5	Jalan Lingkungan	15	Baik	15.000 M
6	Jalan Setapak	10	Baik	10.000 M

2.1.4.6. Telekomunikasi dan Informasi

Penggunaan jaringan komunikasi di Desa Cicinde Selatan, khususnya sambungan telepon belum ada. Jumlah sambungan yang ada (konsumen) yang menggunakan jasa telepon selular / handphone.

Selanjutnya jasa PT POS Indonesia sangat membantu mobilitas komunikasi dan distribusi barang dan jasa, sehingga berbagai transaksi bisnis maupun jasa yang diperlukan masyarakat semakin mudah dicapai.

2.1.4.7. Pengairan dan Keirigasian

Penanganan keirigasian/pengairan diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani sawah maupun palawija. Sumber air untuk keperluan pertanian di wilayah Desa Cicinde Selatan dan sekitarnya di Kecamatan Banyusari pada umumnya berasal dari Bendung Jatiluhur yang berada di Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun kondisi saluran irigasi yang ada cukup memadai, adapun terjadi kebocoran, penyempitan dan pendangkalan sehingga saluran irigasi dimaksud belum dapat memenuhi kebutuhan para petani secara maksimal, hal itu selalu diupayakan perbaikan yang dikordinasikan dengan pihak instansi terkait.

2.1.4.8. Drainase

Sistem drainase merupakan sistem pengaliran air hujan yang terdiri dari 2 (dua) macam sistem, yaitu sistem drainase melalui sungai, solokan atau saluran sekunder yang disebut drainase makro. Sistem ini yang hampir seluruhnya belum terpenuhi di Desa Cicinde Selatan begitupun sistem yang melalui saluran-saluran lingkungan disebut drainase mikro.

2.1.4.9. Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sebagian besar masyarakat menggunakan air bersih dari sumur pompa mesin (jetpump) dan air mineral. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 21
Data Pengguna Air Bersih
Tahun 2015

No.	Sumber Air	Jumlah KK Pengguna	Keterangan
1	PAM	112	-
2	Sumur Gali	164	-
3	Sumur Pompa Jetpump	1.263	Mandi,Cuci,Kakus
4	Air Mineral	219	Air Minum
5	Depot Isi Ulang	62	Air Minum

2.1.4.10. Air Limbah

Jenis air limbah yang terdapat di Desa Cicinde Selatan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu limbah domestik dan limbah non domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan rumah tangga dari kegiatan mandi, cuci dan kakus. Sedangkan limbah non domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan non rumah tangga, seperti limbah penggilingan padi, limbah ternak, limbah industri rumah tangga dan sebagainya. Sistem pembuangan limbah domestik di Desa Cicinde Selatan Selain menggunakan jamban keluarga berupa septictank, juga memanfaatkan sungai, saluran air, solokan, pekarangan dan sawah yang ada disekitarnya. Berdasarkan data yang ada sekarang sebagian besar masyarakat membuang limbah domestik menggunakan jamban keluarga/septictank.

2.1.4.11. Energi

Sebagian besar masyarakat Desa Cicinde Selatan sudah tersambung Jaringan Listrik Negara (PLN). Jaringan listrik sudah masuk ke seluruh wilayah RW/RT, kecuali karena faktor ekonomi ada beberapa rumah

tangga yang masih belum terpasang jaringan, sehingga dengan terpaksa menyambung dari rumah tetangga terdekat. Sampai dengan Tahun 2016 dari sebanyak 1.820 rumah tangga yang ada sudah terpasang jaringan hampir seluruhnya terpasang.

2.1.4.12. Musim

Di Desa Cicinde Selatan terdapat 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, biasanya musim kemarau terjadi mulai bulan Juli sampai dengan bulan Nopember dan musim penghujan terjadi mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei Namun pada tahun 2015 musim hujan dan musim kemarau tidak jelas, karena sepanjang tahun ini selalu turun hujan, sehingga para ahli menyebutnya dengan musim ekstrim.

2.1.4.13. Pola Penggunaan Lahan Pertanian

Berdasarkan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, lahan sawah dimusim penghujan ditanam padi 2 (dua) kali dan dimusim kemarau ditanam palawija/sayur mayur 1 (satu) kali, akan tetapi kebijakan tersebut tidak berjalan karena hampir semua petani menanam padi sepanjang musim. Sedangkan dilahan pekarangan ditanam macam-macam tanaman kecil, buah-buahan dan sebagainya.

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Cicinde Selatan terbagi dalam 3 Dusun, 6 RW dan 23 RT, masing-masing sebagai berikut :

- Dusun 1 : Cicinde IA terdiri dari RT 01/01, RT. 02/01, RT. 03/01, RT. 04/01 dan RT 01/02, RT. 02/02, RT. 03/02, RT. 04/02, RT. 05/02
- Dusun 2 : Cicinde IB terdiri dari RT. 01/03, RT.02/03, RT. 03/03 dan RT. 01/04, RT. 02/04, RT. 03/04
- Dusun 3 : Bangsasuta terdiri dari RT. 01/05, RT.02/05, RT.03/05, RT. 04/05 dan RT. 01/06, RT.02/06, RT.03/06, RT.04/06

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

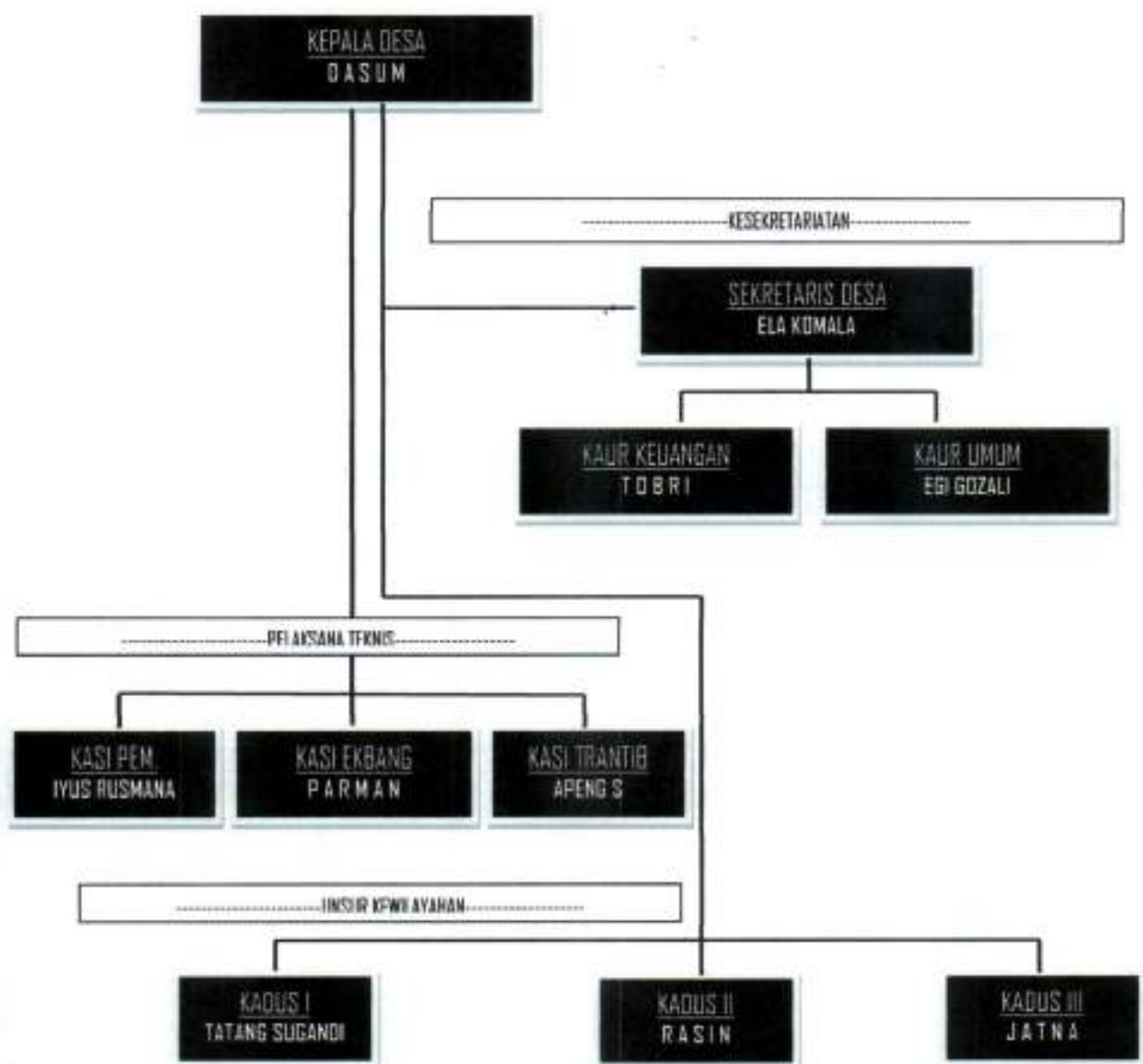
Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

Perangkat Desa, terdiri dari :

1. Unsur Kesekretariatan, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan.
2. Unsur Pelaksana Teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
3. Unsur Kewilayahan terdiri dari Kepala Dusun.

Tabel 22
Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
(SOTK)



2.2.3. Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparat Pemerintah Desa Cicinde Selatan Tahun 2016 seluruhnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1(satu) orang Kepala Desa, dan 9 (sembilan) orang Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 2 (dua) Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kepala Seksi (Kasi) Ekonomi Pembangunan, dan Kepala Seksi (Kasi) Ketenteraman Ketertiban. Serta 3 (Tiga) orang Kepala Dusun sebagai unsur Kewilayahan.

Data Aparatur Pemerintah Desa Cicinde Selatan pada saat ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 23

Data Aparatur Pemerintah Desa Cicinde Selatan
Tahun 2016

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kepala Desa	D A S U M	SLTP
2	Sekretaris Desa	ELA KOMALA	SLTA
3	Kaur Keuangan	TOBRI	SLTA
4	Kaur Umum	EGI GOZALI	SLTA
5	Kasi Pemerintahan	IYUS RUSMANA	SLTA
6	Kasi Ekbang	PARMAN	SLTA
7	Kasi Trantib	APENG SUHERMAN	SLTP
8	Kepala Dusun 1	TATANG SUGANDI	SLTP
9	Kepala Dusun 2	RASIN	SLTP
10	Kepala Dusun 3	JATNA	SLTP

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI

3.1.1. Sumber Daya Alam (SDA)

Tabel 24

Data Jenis Sumber Daya Alam (SDA)

No	Jenis	Jumlah/Luas	Lokasi
1	Tanah Sawah	250 Ha	Tersebar
2	Tanah Pekarangan/Pemukiman	23.5 Ha	Tersebar
3	Tanah Tegalan	21,096 Ha	-
4	Tanah Tambak / Pantai	-	-
5	Tanah Bengkok/Titisara	4 Ha	Desa Gembongan dan Desa Tanjung
6	Tanah Pangonan	-	-
7	Sumur Bor Minyak / Pertamina	2 Ha	Dusun Bangsasuta
8	Sungai	-	-

3.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 25

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Laki - laki	3.056	51,1 %
2	Perempuan	2.925	48,9 %
	Jumlah	5.981	100 %
3	Kepala Keluarga	1.820 KK	
4	Kepadatan Penduduk	51,1/Km	

Tabel 26
Kelompok Usia Penduduk

No	U s i a	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 2 Tahun	81	76	157
2	3 - 4 Tahun	200	140	340
3	5 - 6 Tahun	207	180	387
4	7 - 11 Tahun	266	231	497
5	12 - 14 Tahun	131	132	263
6	15 - 19 Tahun	282	177	459
7	20 - 29 Tahun	574	578	1.152
8	30 - 44 Tahun	638	579	1.217
9	45 - 59 Tahun	473	533	1.006
10	60 - 69 Tahun	148	257	405
11	70 Tahun >	56	42	98
Jumlah		3.056	2.925	5.981

Tabel 27
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak Tamat SD/Sederajat	438	17,9
2	Tamat SD/Sederajat	1.068	43,7
3	Tamat SMP/Sederajat	541	22,2
4	Tamat SMA/Sederajat	350	14,3
5	D 1 s/d S 1	45	1,8
6	S 2	-	-
7	S 3	-	-
8	Buta Huruf	-	-
Jumlah		2.442	100

Catatan : Usia 10 Tahun keatas.

Tabel 28
Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
1	Guru dan PNS	31	1,9
2	Guru Honorer	3	0,2
3	Ustadz	9	0,6
4	TNI	1	0,06
5	POLRI	1	0,06
6	Dokter	1	0,06
7	Perawat	5	0,3

8	Bidan	3	0,2
9	Dukun Bersalin/Paraji	-	-
10	BUMN	1	0,06
11	BUMD	-	-
12	Perangkat Desa	10	0,6
13	Karyawan Perusahaan Swasta	131	8,3
14	Pensiunan PNS	10	0,6
15	Purnawirawan TNI	-	-
16	Purnawirawan POLRI	-	-
17	Wiraswasta	376	24,1
18	Pengrajin	62	3,9
19	Pedagang	189	12,1
20	Petani	148	9,5
21	Buruh Tani	440	28,1
22	Pertukangan	63	4,0
23	Kuli	11	0,7
24	Sopir	31	1,9
25	Ojek	-	-
26	TKI/TKW	23	1,5
27	Jasa lainnya	16	1,0
28	Penganggur	-	-
30	Setengah Penganggur	-	-
Jumlah		1.565	100

Catatan : Usia 15 Tahun keatas.

3.1.3.Sumber Daya Prasarana Fisik Desa

Tabel 29

Data Prasarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Lokasi (RT/RW)
1	TK/TPA	1	Dusun Cicinde IA RT. 003/002
2	PAUD	3	Dusun Cicinde IA RT.004/001, Dusun Cicinde IB RT. 002/003 dan Dusun Bangsasuta RT. 001/005
3	RA	-	-
4	MDA/MDT	3	Dusun Cicinde IA RT. 002/001, Dusun Cicinde IA RT. 004/002 dan Dusun Bangsasuta RT. 002/005
5	SD	1	Dusun Cicinde IA RT. 004/002
6	MI	-	-
7	SMP	-	-

8	MTs	-	-
9	SMA	-	-
10	MA	-	-
11	SMK	-	-
12	PKBM	-	-
13	Kejar Paket A	-	-
14	Kejar Paket B	-	-
15	Kejar Paket C	-	-
16	Pondok Pesantren	-	-
17	Lainnya	-	-
Jumlah		8	

Tabel 30
Data Sarana Peribadatan/Keagamaan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Lokasi (RT/RW)
1	Masjid	3	Tersebar di 3 Dusun
2	Mushola	11	Tersebar di 3 Dusun
3	Majlis Ta'lim	14	Tersebar di 3 Dusun
Jumlah		28	Tersebar di 3 Dusun

Tabel 31
Data Prasarana Perhubungan

No	Jenis	Jumlah/Luas	Lokasi
1	Jalan Negara	-	-
2	Jalan Daerah Provinsi	-	-
3	Jalan Daerah Kabupaten	2 Km	
4	Jalan Desa	3 Km	
5	Jalan Setapak	10 Km	
6	Jembatan	11 Buah	
7	Gorong-gorong	7 Buah	

Tabel 32
Data Prasarana Olah Raga

No	Lapangan Olah Raga	Jumlah	Lokasi
1	Sepak Bola	-	-
2	Bola Volly	3	Tersebar di 3 Dusun
3	Bulu Tangkis	3	Dusun Cicinde IA, Cicinde IB dan Bangsasuta
4	Tenis Meja	2	Cicinde IA dan Cicinde IB
Jumlah		8	

Tabel 33
Data Tempat Usaha/Perekonomian

No	Jenis Tempat Usaha	Jumlah	Lokasi (RT/RW)
1	Heller/Penggilingan Padi	3	
2	Heller/Pengolahan menir	1	
3	Bengkel	4	
4	Toko	7	
5	Warung	35	
6	Lainnya/Kios Saprotan	1	
Jumlah		51	

3.1.4.Sumber Daya Kelembagaan

Tabel 34
Data Kelembagaan Desa

No	Jenis Kelembagaan	Nama Lembaga	Jumlah Anggota
I	Lembaga Pemerintahan Desa	1.Pemerintah Desa	10
		2. BPD	9
II	Lembaga Kemasyarakatan Desa.	1. LPM	9
		2. TP.PKK	13
		3. RW	6
		4. RT	23
		5.LINMAS	10
		6.DKM	6
		7. MUI	1
		8. Remaja Masjid	75
		9.Karang Taruna	11
		10.Kelompok Tani	125
		11.Kelompok Arisan	5
		12.Kelompok Pengajian	15
		13.Kelompok Senam	-
		14.Dasawisma	3
		15.Koperasi/BUMDES	13
		16.Organisasi Olah raga	75
		17. Lainnya	-

3.1.5.Sumber Daya Finansial

Tabel 35
Data Sumber Daya Finansial Tahun 2016

No	Sumber Penerimaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	540.260.000	
2	Dana Desa (DD)	641.741.000	
3	Bantuan infrastruktur Perdesaan dan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Bangub)	115.000.000	
JUMLAH		1.297.001.000	

1.1. **MASALAH**

Masalah adalah hambatan atau kendala yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara harapan dengan kenyataan atau antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan, telah dijumpai beberapa permasalahan yang telah dikelompokkan dalam Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sarana/ Prasarana, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Sosial Budaya, Koperasi dan UKM serta Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

3.2.1. Bidang Pendidikan

Keclemahan mendasar yang membuat posisi pembangunan manusia di Desa Cicinde Selatan terletak pada bidang pendidikan. Tingkat Pendidikan masyarakat pada umumnya tergolong rendah, data hasil sensus penduduk tahun 2010 memperlihatkan bahwa penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum tamat SD/Sederajat prosentasinya cukup tinggi, sementara yang telah tamat SD, SLP, SLA sampai dengan Perguruan Tinggi prosentasesnya sangat rendah.

Hal ini disebabkan antara lain ; kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas rendah, sarana prasarana pendidikan yang ada untuk semua jenjang pendidikan masih relatif terbatas bahkan ada yang sudah rusak dan tenaga pengajar belum memadai.

3.2.2. Bidang Kesehatan

Pembangunan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka kematian, khususnya angka kematian bayi, angka kematian anak balita, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian kasar. Selain itu upaya meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat pada masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat diperhadapkan dengan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang masih belum memadai, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat masih rendah dan kurangnya penyuluhan/sosialisasi dari pihak-pihak terkait.

3.2.3. Bidang Sarana Prasarana

Infrastruktur perdesaan selama beberapa tahun terakhir ini banyak mengalami peningkatan, sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dirasakan peningkatannya.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan aktifitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dipandang perlu sarana dan prasarana yang belum memadai terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya serta dipelihara kelestariannya, terutama yang berhubungan dengan prasarana produksi seperti saluran irigasi dan bangunan bagi air dan sejenisnya, prasarana pehubungan seperti jalan desa, gang, jembatan, gorong-gorong dan sejenisnya, prasarana sosial seperti tempat peribadatan, lapangan olah raga, kantor pemerintah desa, gedung-gedung sekolah dan sejenisnya, serta prasarana pemasaran, seperti huter, pengolahan menir, toko, kios, warung dan tempat-tempat usaha lainnya.

3.2.4. Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan pada satu sisi memberikan dampak yang positif khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain mengakibatkan meningkatnya beban dan potensi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Fenomena yang terjadi menunjukkan adanya kemerosotan kualitas lingkungan.

Hal ini terjadi salah satu diantaranya karena tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang tertib, bersih dan sehat masih rendah, seperti buang sampah sembarangan tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak tersedia saluran pembuangan air limbah keluarga yang memadai dan belum meratanya lampu penerangan jalan umum (PJU).

3.2.5. Bidang Sosial Budaya

Perkembangan Sosial Budaya masyarakat dipengaruhi oleh perpaduan antara kepercayaan, adat istiadat dan pengaruh budaya luar juga karena sistem pemerintahan yang dijalankan dan kondisi pendidikan serta ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan Sosial Budaya yang berkembang dan terjadi sampai saat ini diantaranya :

1. Masih terbatasnya SDM yang berkualitas dibidang kebudayaan.
2. Kurangnya sarana dan fasilitas pembinaan generasi muda baik dalam bidang olah raga, seni maupun budaya daerah setempat.
3. Masih belum terkelolanya aset seni dan budaya daerah sebagai aset yang memiliki nilai jual.
4. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat serta tingginya angka pengangguran dan rumah tangga miskin.

3.2.6. Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat (UKM)

Koperasi dan Usaha Masyarakat perlu terus dikembangkan, karena merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi, diantaranya adalah :

1. BUMDes yang baru ada sebagai soko guru perekonomian perkembangannya baru berjalan.
2. Para pengrajin / industri rumah tangga masih terbatas baik dalam pengelolaan hasil produksi, pemasaran maupun modal usahanya.
3. Usaha Simpan Pinjam di Badan lain yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Desa merajalela ditengah masyarakat.
4. Harga hasil pertanian ditentukan oleh para calo tengkulak.

3.2.7. Bidang Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa masih belum maksimal menjalankan tugas pokoknya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pelaksana pembangunan, disebabkan antara lain :

1. Sarana dan prasarana penunjang mobilitas operasional relatif terbatas
2. Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Rendahnya kualitas SDM masyarakat yang sebagian besar berketerampilan rendah, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Lemahnya kemampuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan masih bersifat parsial.
5. Kesejahteraan aparat Pemerintah Desa tidak memadai.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) merupakan proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa, karena penjaringan aspirasi dalam penyusunan RPJM-Des dilakukan mulai dari tingkat yang paling bawah, diawali dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilakukan secara partisipatif mulai dari Tingkat RT/RW dan Musyawarah Dusun untuk menggali masalah dan potensi terutama yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan Musyawarah Desa untuk membahas hasil Musyawarah Dusun dan perumusan tentang sejarah Desa, Draft Visi dan Misi Desa, pengelompokan kegiatan, serta penyusunan draft RPJM-Des.

Hasil Musyawarah Desa selanjutnya dibahas dalam acara Musrenbangdes yang menghasilkan Rancangan RPJM-Des. RPJM-Des ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES).

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Desa, sehingga secara bertahap perlu segera diatasi. Dengan memperhatikan masalah dan potensi Desa, maka isu strategis terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Cicinde Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan umum pemerintah masih dirasakan belum memadai bagi sebagian masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan pelayanan umum lainnya.
2. Bantuan alokasi dana dari pemerintah untuk menunjang biaya pembangunan baik dari pemerintah daerah maupun pusat sudah berjalan , sementara kemampuan dan partisipasi masyarakat relatif rendah.
3. Sumber daya Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga Desa yang ada masih perlu terus ditingkatkan pengetahuan, kemampuan, kemauan dan kerjasamanya sejalan dengan tuntutan perkembangan pembangunan.
4. Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif / angkatan kerja masih dirasakan kurang memenuhi harapan dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha yang ada kurang termanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
5. Pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan sektor riil kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara merata kepada segenap

masyarakat. Hal ini masih tingginya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

6. Kondisi lingkungan hidup cenderung semakin memprihatinkan sebagai akibat dari kurang sadarnya masyarakat dalam pelestarian lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, saluran pembuangan air limbah rumah tangga kurang mendapat perhatian serius dan sebagainya.
7. Lembaga-lembaga perekonomian masyarakat yang ada masih perlu diberikan pembinaan secara intensif, baik dalam permodalan maupun manajemen pengelolannya.
8. Rusaknya sebagian besar sarana dan prasarana Desa, baik sarana prasarana produksi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pertanian pemasaran serta sosial dan sejenisnya. Sehingga masyarakat banyak menghadapi hambatan dalam melaksanakan aktifitasnya untuk pengembangan perekonomian yang lebih baik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan isu strategis tersebut diatas maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada 5 (*lima*) tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Visi dan Misi Desa dan selanjutnya dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan serta rencana/program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2016 - 2021.

RPJM-Des ini selain sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Des Tahunan dan APB-Des juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menyclenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama masa jabatannya.

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. Visi

Memperhatikan kondisi pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi selama 5 (*lima*) tahun kedepan serta dengan pertimbangan modal dasar yang dimiliki maka Visi Pembangunan Desa Cicinde Selatan adalah :
” **TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA CICINDE SELATAN YANG SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN DIBIDANG PERTANIAN , PERDAGANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA** ” Visi dimaksud, Desa Cicinde Selatan yang ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistim keagamaan nasional dan kondisi ideal kehidupan agamis.

Desa Cicinde Selatan yang Sejahtera ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Desa Cicinde Selatan yang memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan bermata pencaharian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Kondisi ideal di Bidang Pendidikan ditunjukkan dengan:

Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat yang dilihat dari target Pendidikan Dasar telah tuntas dan memasuki tahapan pendidikan tingkat menengah.

4.1.2. Misi

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pencapaian hasil pertanian yang optimal;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM disegala bidang);**
- 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perdagangan;**
- 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;**
- 5. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat;**
- 6. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat desa dan didasari rasa tanggung jawab yang tinggi;**
- 7. Meningkatkan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memiliki rasa solidaritas yang tinggi;**

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Menggunakan lebih banyak strategi yang memberi kepercayaan dan kemampuan masyarakat pada kegiatan sosial ekonomi untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat. Untuk itu dalam kegiatan pembangunan Desa memberlakukan masyarakat tidak hanya sebagai obyek, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan.
2. Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung dan memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial ekonomi untuk *mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran.*
3. Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

4. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pihak ketiga, seperti BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Perguruan tinggi dan sebagainya untuk pengembangan BUMDes dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

4.2.2. Potensi dan Masalah

4.2.2.1. Potensi

Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) secara umum menggambarkan banyaknya potensi yang dimiliki, meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Kelembagaan dan Sumber Daya Finansial.

1. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang terdapat di Desa Cicinde Selatan terdiri dari lahan sawah, sungai, saluran irigasi.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Tingkat pendidikan masyarakat lumayan maju/ada peningkatan.
- b. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian tetap.
- c. Semangat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa relatif tinggi.

3. Sumber Daya Buatan (Prasarana Fisik)

Prasaran Fisik Desa dalam menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pelayanan umum sebagian telah tersedia, seperti prasarana produksi, perhubungan, sosial maupun pemasaran.

4. Sumber Daya Kelembagaan

- a. Lembaga Pemerintahan Desa, terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- b. Lembaga Kemasyarakatan, meliputi LPM, TP.PKK, RW, RT, LINMAS, DKM, MUI, Karang Taruna, Kelompok Tani, Kelompok Pengajian dan sebagainya.

5. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Finansial merupakan sumber penerimaan keuangan pemerintah Desa, baik untuk Belanja Rutin/Pegawai maupun untuk Belanja Pembangunan/Publik, diantaranya APBDes Pendapatan Asli Desa, ADD, Dana Desa/APBN, Bantuan Gubernur untuk Sarana Infrastruktur dan Tambahan Penghasilan Apartur Pemerintah Desa, Swadaya Masyarakat dan sumber lainnya.

4.2.2.2. Masalah

Berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) telah dijumpai beberapa permasalahan yang telah dikelompokkan dalam Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sarana/ Prasarana, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Sosial Budaya, Bidang Koperasi dan UKM serta Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

- a. Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum memiliki gedung sekolah sendiri yang memadai.
- b. Sekolah Swasta/Madrasah/MI, dari segi alat-alat kantor/ATK dan honorarium gurunya kurang memadai.
- c. Belum tersedia ruang perpustakaan sekolah.
- d. Masih ada murid Drop Out (DO) dari Tingkat SD, SMP, terutama SMA.

2. Bidang Kesehatan

- a. Prasarana dan sarana kesehatan masih terbatas
- b. Posyandu belum seluruhnya punya tempat tersendiri, sisanya masih menumpang dirumah-rumah penduduk dan peralatan kegiatan Posyandu belum lengkap.
- c. Tenaga Kesehatan / Kader Posyandu kurang terampil dan jumlahnya relatif terbatas.
- d. Partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat masih rendah.

3. Bidang Prasarana/Sarana

- a. Prasarana Produksi, seperti saluran irigasi banyak yang mengalami pendangkalan, penyempitan dan tanggul bocor, belum tersedia bangunan bak bagi/dam/pintu air yang memadai.
- b. Prasarana Perhubungan, seperti jalan desa, jalan setapak dan gang banyak yang rusak, musim hujan banjir, jembatan dan gorong-gorong yang kurang layak teknis.
- c. Prasarana Sosial antara lain ; perumahan tidak layak huni, belum tersedianya sanggar seni budaya terutama untuk kegiatan pemuda, belum ada kantor RW/RT dan Poskamling yang memadai.

4. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) masih belum merata
- b. Saluran pembuangan air limbah rumah tangga belum tertata dengan baik,
- c. Belum tersedia bak-bak penampungan sampah rumah tangga.
- d. Masih banyak rumah kumuh, terutama rumah tangga miskin (RTM)

5. Bidang Sosial Budaya

- a. Kurangnya sarana dan fasilitas pembinaan generasi muda baik dalam bidang olah raga, seni maupun budaya daerah setempat.
- b. Masih belum terkelolanya aset seni dan budaya daerah sebagai aset yang memiliki nilai jual.
- c. Kurangnya pembinaan yang intensif dari pihak-pihak terkait, baik dari tingkat Kecamatan maupun Kabupaten

6. Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat (UKM)

- a. Koperasi /BUMDes yang sudah ada sebagai soko guru perekonomian rakyat perkembangannya masih belum maksimal.
- b. Keradaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki baru terbentuk dan berdiri.
- c. Para pengrajin / industri rumahan kemampuannya masih terbatas baik dalam pengelolaan hasil produksi, pemasaran maupun modal usahanya.
- d. Usaha Simpan Pinjam ilegal merajalela ditengah masyarakat.
- e. Harga hasil produksi pertanian ditentukan oleh para calo tengkulak.

7. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

- a. Sarana dan prasarana penunjang mobilitas operasional pemerintah Desa dan lembaga masyarakat relatif terbatas
- b. Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah Desa belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Rendahnya kualitas SDM masyarakat yang sebagian besar berketerampilan rendah, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- d. Lemahnya kemampuan penyusunan rencana pembangunan Desa dan masih bersifat parsial.
- e. Kesejahteraan aparat pemerintah Desa tidak memadai.

1.2.3. Program Pembangunan Desa

Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa disusun berdasarkan Urusan/Bidang, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat / Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencakup Bidang-bidang sebagai berikut :

- 1, Bidang Pendidikan ;
2. Bidang Kesehatan ;
3. Bidang Sarana Prasarana ;
4. Bidang Lingkungan Hidup ;
5. Bidang Sosial Budaya ;
6. Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat ;
7. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.

Urusan Pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, yaitu Bidang Pertanian.

Dalam upaya terealisasinya Bidang-bidang program/kegiatan pembangunan Desa dimaksud, maka skala prioritas program pembangunan Desa Cicinde Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

4.2.3.1. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat

- a. Penyediaan dan perbaikan prasaran dan sarana pendidikan
- b. Pengurangan angka drop out anak usia sekolah
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas guru serta mutu lulusan pendidikan.
- d. Pengembangan pendidikan non formal

4.2.3.2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a. Penyediaan/peningkatan prasarana dan sarana kesehatan.
- b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak
- c. Penanganan gizi buruk dan pengobatan gratis bagi warga miskin.
- d. Peningkatan kemampuan Tenaga Kesehatan Desa / Kader Posyandu.
- e. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

4.2.3.3. Peningkatan Sarana Prasarana/Infrastruktur Perdesaan

- a. Perbaikan dan pemeliharaan prasarana perhubungan, seperti jalan desa, jalan setapak, gang, jembatan dan gorong-gorong.
- b. Perbaikan dan pemeliharaan prasarana irigasi, seperti saluran air primer maupun skunder, bangunan-bangunan bak bagi, dan sebagainya.

4.2.3.4. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan (K3)

- a. Peningkatan sistem keamanan lingkungan
- b. Menekan angka tindak kriminal
- c. Peningkatan sarana dan prasarana K3, seperti bak sampah, mesin potong rumput dan Penerangan Jalan Umum (PJU),
- d. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang memadai
- e. Penataan/perbaikan rumah kumuh / Rumah Tangga Miskin (RTM)

4.2.3.5. Peningkatan Sosial Budaya Masyarakat

- a. Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana kegiatan generasi muda bidang olah raga dan seni budaya.
- b. Meningkatkan pembinaan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik dari tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.
- c. Peningkatan prasarana peribadatan, seperti masjid dan mushola dan majlis ta'lim.

4.2.3.6. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

- a. Peningkatan keterampilan dan permodalan usaha masyarakat
- b. Peningkatan sarana prasarana perekonomian masyarakat
- c. Pembinaan dunia usaha setempat

4.2.3.7. Peningkatan Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Desa

- a. Peningkatan sarana prasarana pendukung Pemerintahan Desa.
- b. Peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri
- c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat sesuai fungsi dan perannya dalam membantu Pemerintah Desa, menggerakkan masyarakat serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

4.2.4. Strategi Pencapaian

Berdasarkan Gambaran Umum dengan mengkaji potensi dan permasalahan, isu strategis dan kondisi yang dihadapi pada saat ini, serta dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Cicinde Selatan Tahun 2016 – 2021 maka perlu diwujudkan dengan menentukan strategi pencapaian program-program Pembangunan Desa, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Merencanakan kembali terhadap program-program yang belum dapat direalisasikan dari hasil perencanaan tahun-tahun sebelumnya.
2. Melanjutkan program / kegiatan pembangunan yang belum dapat diselesaikan pada tahun yang sedang berjalan.

3. Memprioritaskan kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan orang banyak, terutama yang berkaitan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Mengupayakan berbagai hal yang dapat membangkitkan ekonomi dan daya beli masyarakat.
5. Pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan produksi terutama jalan-jalan desa, jalan, lingkungan , jalan setapak, saluran irigasi, tempat peribadatan serta keolahragaan yang kebutuhannya mendesak.
6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan untuk terjaminnya kenyamanan hidup masyarakat.
7. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa.

BAB V P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Cicinde Selatan Tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 01 Tahun 2016.

Dengan tersusunnya RPJM-Des ini diharapkan terjalainya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat maupun Rencana Pembangunan Nasional. Selanjutnya RPJM-Des ini akan dijabarkan kedalam RKP-Des dan akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk setiap tahunnya. Selain itu RPJM-Des juga merupakan pedoman dalam penyusunan APB-Des dan bahan penilaian Kinerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama masa jabatannya.

Partisipasi dari semua pemangku kepentingan bersama seluruh warga masyarakat sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan RPJM-Des ini sesuai dengan kemampuan, peran dan fungsinya masing-masing demi terwujudnya Visi dan Misi Desa Cicinde Selatan

Kami menyadari, bahwa karena keterbatasan yang kami miliki sudah barang tentu RPJM-Des Desa Cicinde Selatan Tahun Anggaran 2016-2021 ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu kepada semua pihak yang berkepentingan dimohon bantuan dan sumbangan pemikirannya demi kesempurnaannya dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di : Cicinde Selatan
Pada tanggal : 02 Februari 2016

KEPALA DESA CICINDE SELATAN

